

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia sedang terpacu untuk melaksanakan pembangunan disegala bidang dalam rangka menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Pemerintah mempunyai peran utama sebagai penggerak dalam pembangunan, yaitu dalam perencanaan dan pelaksana pembangunan nasional. Indonesia memiliki beberapa daerah yang sangat luas baik dari provinsi maupun kota/kabupaten sehingga peran dari pemerintah daerah tersebut sangat diperlukan dalam menunjang situasi pembangunan disetiap daerah tersebut. Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat yang salah satunya adalah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan fungsi yang penting dan strategis, karena dengan perencanaan bisa dilihat daerah akan dibawa ke mana, dengan tetap mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Perencanaan yang baik ialah perencanaan yang dilakukan dengan tetap mendasarkan pada data dan informasi yang akurat, valid dan akuntabel. Demikian juga pembangunan daerah harus tetap berada dalam bingkai pembangunan nasional. Hakikat pembangunan nasional ialah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan nasional mencakup semua matra dan aspek kehidupan, baik itu aspek ekonomi, sosial, budaya, ideologi, mau.pun stabilitas negara, di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam pembangunan, terkandung suatu upaya yang terus-menerus dilakukan oleh penduduk negara guna mencapai sasaran kesejahteraan yang dinginkannya, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Terkait dengan hal itu, menurut Todaro, pembangunan suatu negara dapat diarahkan pada 3 (tiga) hal pokok, yaitu meningkatkan ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok bagi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, dan meningkatkan

kemampuan masyarakat dalam mengakses baik kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial dalam kehidupannya.

Sebagai sebuah proses, pembangunan harus tetap berjalan sesuai tahapannya yang berdasarkan jangka waktu, biaya, atau hasil tertentu yang diharapkan akan diperoleh dari pelaksanaan pembangunan tersebut. Di dalam melakukan pembangunan, setiap Pemerintah Daerah tentunya memerlukan perencanaan yang akurat serta diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap pembangunan yang dilakukan. Salah satu kunci keberhasilan sebuah pembangunan terletak pada kualitas perencanaan pembangunan. Pembuat rencana harus mampu untuk merumuskan pembangunan di berbagai sektor. Oleh karena itu, pembuat rencana pembangunan dituntut untuk memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas dalam pembangunan sebuah daerah berdasar segala potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa rangkaian proses pembangunan daerah merupakan proses yang kompleks, yang melibatkan banyak faktor. Selain itu, proses pembangunan di daerah juga selalu harus dihubungkan dengan pembangunan nasional sebagai satu-kesatuan yang sistemik. Pada poin ini, sinergi antara Pemerintah Daerah dan Pusat menjadi hal yang penting untuk diupayakan.

Perencanaan pembangunan kota merupakan suatu proses yang sistematis dan terarah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Proses ini meliputi analisis situasi dan kondisi existing, perumusan visi dan misi, penyusunan strategi dan program, serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.

Salah satu upaya pemerintah dalam rangka memajukan pembangunan daerah kota Bekasi dengan menetapkan peraturan mengenai pembentukan badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPELITBANGDA) Kota Bekasi sebagai perangkat daerah. Oleh karena itu maka dengan adanya pembentukan badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPELITBANGDA) Kota Bekasi sangat diperlukan keberadaannya untuk menyusun dan melaksanakan pembangunan secara merata dan adil dengan otonomi yang seluas-luasnya. Untuk itu pemerintah

mengupayakan agar pembangunan tersebut dapat berjalan semaksimal mungkin tanpa ada hambatan. Untuk itu peranan BAPPELITBANGDA sebagai katalisator dalam mendesain perencanaan dan penganggaran menjadi lebih baik dan benar, yang akan dituangkan dalam APBD Kota setiap tahun menjadi kunci utama dan ini menjadi tugas pokok dan fungsi BAPPELITBANGDA sebagai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Bekasi.

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) adalah lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretariat daerah. Badan ini merupakan tugas pokok Walikota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang penelitian perencanaan pembangunan daerah. Dalam penyelenggaraan desentralisasi, salah satu urusan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah ialah urusan perencanaan pembangunan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perencanaan pembangunan daerah disusun sebagai satu-kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah itu dikoordinasikan, disinergikan serta diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

Salah satu upaya pemerintah dalam rangka memajukan pembangunan daerah kota Bekasi dengan menetapkan peraturan mengenai pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kota Bekasi sebagai perangkat daerah. Oleh karena itu maka dengan adanya pembentukan badan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan daerah (BAPPELITBANGDA) Kota Bekasi sangat diperlukan keberadaannya untuk menyusun dan melaksanakan pembangunan secara merata dan adil dengan otonomi yang seluas-luasnya. Untuk itu pemerintah mengupayakan agar pembangunan tersebut dapat berjalan semaksimal mungkin tanpa ada hambatan. Untuk itu peranan Badan Perencanaan Pembangunan

Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) sebagai katalisator dalam mendesain perencanaan dan penganggaran menjadi lebih baik dan benar, yang akan dituangkan dalam APBD Kota setiap tahun menjadi kunci utama dan ini menjadi tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) sebagai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Bekasi.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi No.8 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi :

1. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang penelitian dan pengembangan menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka Panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), dan jangka pendek (RPD) yang berkualitas.
2. Melakukan pembinaan teknis dan sinkronisasi dan verifikasi keselarasan perencanaan perangkat daerah (RENSTRA dan RENJA) dengan perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) dan kinerja perangkat daerah Kota Bekasi (RENSTRA dan RENJA).
3. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penelitian di berbagai bidang pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan untuk dapat di manfaatkan dalam rangka mewujudkan pencapaian visi misi pembangunan daerah.
4. Mengkoordinasikan penguatan dan pelaksanaan inovasi guna peningkatan daya saing daerah.

Bidang Analisis Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas dan fungsi:

1. Analisis Pembangunan: Melakukan analisis terhadap data dan informasi pembangunan untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.
2. Perencanaan Pembangunan: Menyusun rencana pembangunan daerah yang komprehensif dan terintegrasi, termasuk rencana strategis dan rencana operasional.
3. Evaluasi Pembangunan: Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah untuk menilai efektivitas dan efisiensi program-program pembangunan.
4. Pengembangan sistem perencanaan: Mengembangkan sistem perencanaan yang efektif dan efisien untuk mendukung pembangunan daerah.
5. Koordinasi dan konsultasi: Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan stakeholder terkait dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

Dalam menjalankan tupoksinya, Bidang Bidang Analisis Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan (AP4EP) biasanya bekerja sama dengan instansi lain di lingkungan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dilakukan secara terintegrasi dan efektif.

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi (Bappelitbangda) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai rencana dan target yang telah ditetapkan. Melihat tupoksi dari Bidang Analisis Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan (AP4EP) ada beberapa peran dari Bidang Bidang Analisis Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan (AP4EP) ini sangat penting terlebih untuk Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan tetapi melihat kondisi dari beberapa program yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi

(bappelitbangda) ternyata masih kurang optimal hal ini dilihat dari data tidak terintegrasi dan terlambat. Selain itu, berikut merupakan informasi keterlambatan pengumpulan data kegiatan pembangunan daerah.

Tabel 1.1 Keterlambatan Data

Keterlambatan Pengumpulan Data Kegiatan Pembangunan Daerah	
2019	29 dari 53 kegiatan terlambat
2020	38 dari 62 kegiatan terlambat
2021	37 dari 51 kegiatan terlambat
2022	25 dari 58 kegiatan terlambat
2023	14 dari 53 kegiatan terlambat

Sumber: Bappelitbangda Kota Bekasi

Parameter keterlambatan pengumpulan data diatas yaitu waktu yang sudah ditentukan sudah melewati batas waktu. Kegiatan yang melebihi batas waktu pengumpulan data ditentukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi (Bappelitbangda) untuk dilaksanakan oleh perangkat daerah pelaksanaan kegiatan. Beberapa kegiatan yang dimonitoring dan evaluasi terdapat kekurangan, kelemahan dan kendala yang terjadi. Beberapa permasalahan tidak hanya terjadi dalam eksternal pembangunan, tetapi internal. Manajemen monitoring dan evaluasi yang dilakukan masih terbilang kurang optimal dikarenakan masih terjadi ketidaksesuaian kegiatan yang dilaksanakan, waktu pengerjaan yang tidak selesai sesuai jadwal dan terjadi perbedaan output kegiatan. Banyak faktor yang menghambat kegiatan pembangunan daerah tersebut dinilai dari tingkat keberhasilan kerja program dan kegiatan yang belum maksimal. Kendala setiap tahun berbeda setiap tahunnya. Berbagai macam kondisi dan situasi yang terjadi di setiap tahun memungkinkan proses monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan berganti sistem dan manajemennya. Dengan demikian, ada beberapa indikasi permasalahan tentang kurang optimalnya Peran Bidang Analisis Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas dan fungsi melihat dari tabel keterlambatan data diatas hal itu juga di katakan

oleh Bapak Dede Hendriyana S.T selaku Sub Koordinator Analisis Pembangunan Daerah yaitu:

“Dampaknya cukup besar. Kalau data terlambat, proses analisis jadi tertunda. Padahal data itu jadi dasar evaluasi capaian pembangunan dan penyusunan kebijakan selanjutnya. Misalnya di tahun 2020 dan 2021, karena lebih dari separuh kegiatan terlambat laporannya, proses rekap dan analisis juga ikut molor. Itu berpengaruh pada ketepatan waktu penyusunan laporan kinerja. Tapi dengan perbaikan sistem koordinasi dan peningkatan komitmen OPD, di 2023 situasinya jauh lebih baik. Artinya, ada peningkatan kesadaran dan tata kelola pelaporan yang lebih rapi.”

Melihat Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa keterlambatan pengumpulan data kegiatan pembangunan berdampak signifikan terhadap proses analisis dan evaluasi pembangunan daerah, karena data yang terlambat menyebabkan rekapitulasi dan analisis ikut tertunda sehingga memengaruhi ketepatan waktu penyusunan laporan kinerja serta perumusan kebijakan selanjutnya; kondisi ini terlihat jelas pada tahun 2020 dan 2021 ketika lebih dari separuh kegiatan terlambat dilaporkan sehingga proses evaluasi menjadi molor, namun melalui perbaikan sistem koordinasi dan peningkatan komitmen OPD pada tahun 2023, terjadi penurunan keterlambatan yang menunjukkan adanya peningkatan kesadaran administratif dan tata kelola pelaporan yang lebih tertib, terstruktur, dan akuntabel.

Dengan demikian, penulis menduga ada beberapa indikasi permasalahan aktual di bidang AP4EP tentang pengumpulan data instansi penyebabnya adalah:

1. Kurangnya peran Bidang Analisis Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan (AP4EP) dalam pembagian tugas monitoring dan evaluasi tidak merata, serta mekanisme koordinasi lintas OPD belum efektif.
2. Sumber daya manusia yang kurang memadai di Bidang Analisis Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan (AP4EP) sehingga dalam mengolah dan mengkaji data menyebabkan analisis tidak menyeluruh dan lambat.

Mengingat hal – hal tersebut di atas, maka peran bidang analisis pembangunan perencanaan program pengendalian evaluasi dan pelaporan Badan Perencanaan

Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi (BAPPELITBANGDA) bisa melakukan tugasnya dengan baik. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi (Bappelitbangda) merupakan perangkat daerah yang memberikan pertimbangan teknis bagi Perangkat Daerah lain dalam rangka mendukung penetapan suatu kebijakan daerah yang berbasis kelitbangan. Untuk itu, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi (Bappelitbangda) dituntut untuk membuat dan mendorong penelitian di berbagai bidang pembangunan baik yang dilakukan oleh internal Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi (Bappelitbangda) maupun dikerjasamakan dengan Perguruan Tinggi, serta didukung oleh Sistem Informasi hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi yang mudah diakses untuk semua kalangan maka peran dari bidang analisis pembangunan perencanaan program pengendalian evaluasi dan pelaporan. Hal ini yang menyebabkan peran bidang analisis pembangunan perencanaan program pengendalian evaluasi dan pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi (BAPPELITBANGDA) secara umum dinilai belum optimal. Fokus dari penelitian ini yaitu bagaimana Bidang Analisis Pembangunan Perencanaan Program Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan BAPPELITBANGDA. Untuk itu, peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“PERAN BIDANG ANALISIS PEMBANGUNAN PERENCANAAN PROGRAM PENGENDALIAN EVALUASI DAN PELAPORAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN”**.

1.2 Rumusah Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana peran bidang analisis pembangunan perencanaan program pengendalian evaluasi dan pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bekasi dalam perencanaan pembangunan?
2. Hambatan – Hambatan apa saja yang dihadapi dalam peran bidang analisis pembangunan perencanaan program pengendalian evaluasi dan pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bekasi dalam perencanaan pembangunan?

3. Upaya apa saja yang dilakukan untuk menghadapi hambatan-hambatan peran bidang analisis pembangunan perencanaan program pengendalian evaluasi dan pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bekasi dalam perencanaan pembangunan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran bidang analisis pembangunan perencanaan program pengendalian evaluasi dan pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi dalam perencanaan pembangunan
2. Untuk mengetahui hambatan – hambatan apa saja yang dihadapi dalam peran bidang analisis pembangunan perencanaan program pengendalian evaluasi dan pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bekasi dalam perencanaan pembangunan
3. Upaya apa saja yang dilakukan untuk menghadapi hambatan-hambatan peran bidang analisis pembangunan perencanaan program pengendalian evaluasi dan pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bekasi dalam perencanaan pembangunan

1.4 Signifikansi Penelitian

Signifikansi Penelitian Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi beberapa pihak, antara lain sebagai berikut:

1.4.1 Signifikansi Akademik

Berdasarkan penelitian permasalahan tentang “peran bidang analisis pembangunan perencanaan program pengendalian evaluasi dan pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bekasi dalam perencanaan pembangunan” diharapkan penelitian ini berjalan dengan lancar, selain itu ada hasil studi yang dijadikan sebagai referensi sebagai berikut:

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

NO	Penulis	Judul	Hasil
1.	Siti Nur, Endra Wijaya, Febri Meutia. (2021).	Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Depok Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Jurnal Legal Reasoning Vol. 4, No. 1, Desember 2021. P-ISSN 2654-8747. Jakarta.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) ialah badan yang mempunyai peran penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Bappeda membantu Kepala Daerah dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah serta penilaian atas pelaksanaannya. Dalam penyusunan RPJMD Tahun 2016-2021, Bappeda Kota Depok masih menghadapi beberapa kendala, seperti persoalan ketersediaan data atau informasi yang belum akurat dan juga persoalan keterbatasan kualitas serta kuantitas sumber daya manusia di Bappeda yang belum memadai.
2.	Nur Santi. (2023).	Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Penyusunan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) penyusunan anggaran dan pendapatan belanja daerah di bidang infrastruktur Kota Makassar dalam upaya perbaikan masih menghadapi beberapa kendala seperti kekurangan dana, 2) faktor-faktor penghambat yang

		Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah Di Bidang Infrastruktur (Studi Kasus Kota Makassar). Makassar.	dihadapi oleh Bappeda Kota Makassar dalam penyusunan anggaran dan pendapatan belanja daerah di Kota Makassar yaitu kesiapan anggaran, usulan yang terlalu banyak, serta kurangnya dokumen penunjang.
3	Rizam, Teuku (2019)	Peranan Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Kabupaten Aceh Timur	Hasil penelitian adalah (1) Peran Bappeda dalam perencanaan pembangunan partisipatif sarana dan prasarana, kurang baik karena kurangnya komunikasi yang aktif antara unsur Bappeda dengan unsur Instansi. (2) Peran Bappeda dalam aspek memadukan kegiatan, berjalan dengan baik terlihat dari OPD yang memadukan kegiatan yang sejenis. (3) Aspek mengidentifikasi keterkaitan dan kepentingan Instansi berjalan dengan baik, adanya identifikasi terhadap OPD. (4) Peran Bappeda dalam perumusan perencanaan pembangunan sarana dan prasarana sudah baik karena perencanaan yang dilakukan Bappeda bersifat makro yang di muat dalam RPJMD. (5) Aspek evaluasi perencanaan berjalan baik,

			mengevaluasi dokumen-dokumen juga mengadakan Musrenbang. (6) Aspek memberi petunjuk dan bimbingan berjalan baik, adanya pelatihan dan bimbingan yang di adakan Bappeda dalam perencanaan pembangunan. (7) Peran Bappeda dari aspek keaktifan mengikuti rapat koordinasi sudah baik, instansi merasa rapat koordinasi merupakan hal penting bagi pembangunan.
4	Oktalia Azmi Fadila, Mahrizal, Siti Khalijah (2021)	Efektivitas peran bappeda dalam pembangunan kota medan	Bappeda Kota Medan memiliki fungsi untuk merumuskan suatu kebijakan dalam perencanaan pembangunan Kota, selain itu bappeda juga menyusun pola dasar pembangunan daerah yang terdiri dari RPJPD, RPMD, RKPD, RENSTRA, RENJA. Selain dari pada menyusun rencana pembangunan, Bappeda Kota Medan juga harus menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dalam penyusunan pembangunan dan anggaran untuk membangun Kota Medan berkah sesuai dengan visi Kota Medan “terwujudnya masyarakat Kota Medan yang berkah, maju, dan kondusif “Bappeda harus mengikuti perkembangan dan harus mempersiapkan rencana pembangunan Kota agar dapat menyempurnakan perencanaan pembangunan Kota lebih

			lanjut.
5	Mulyana, Manuel Pieter Stenly Arfayan (2021)	Efektivitas peran bappeda dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di pasar sore tapioka kelurahan siriwini distrik nabire kabupaten nabire provinsi papua	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Peran Bappeda dalam Perencanaan Pembangunan belum efektif. Sesuai dengan indikator teori efektivitas, dimana masih belum maksimalnya koordinasi antar stakeholder terkait untuk melaksanakan pembangunan di Pasar Sore Tapioka. Kemudian, masyarakat pelaku ekonomi juga merasa belum puas dengan pembangunan pasar tersebut yang kurang memadai, hal ini disebabkan karena Pasar Sore Tapioka belum memiliki data teknis atau sertifikat tanah yang jelas.
6	Dakwah Islamiyah, Fakhsiannor, Murdiansyah Herman (2021)	Peranan badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda) dalam pembangunan kota banjarbaru tahun 2021	Hasil penelitian Peranan BAPPEDA Kota Banjarbaru dalam perencanaan kota banjarbaru sudah dilaksanakan sesuai, yaitu dengan baik telah menyinkronkan dan menyelaraskan arah pembangunan melalui apa yang telah ditetapkan Walikota dalam perencanaan pembangunan daerah dengan baik. Sedangkan faktor penghabatnya iyalah masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban

7	Yosi Putri (2022)	Peranan badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda) dalam perencanaan pembangunan di kabupaten labuhanbatu	Hasil yang diperoleh adalah Bappeda Kabupaten Labuhanbatu sangat berperan aktif dalam hal untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Namun dalam menjalankan tugasnya sebagai perencana, koordinator, dan pengontrol serta juga dalam pengembangan suatu pembangunan daerah masih terdapat kesenjangan yang dihadapi. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa dalam penyusunan dokumen perencanaan Bappeda masih belum efektif dan efisien, hal ini dikarenakan kualitas sumber daya manusia saat ini masih rendah.
8	HANIFFUDIN (2019)	peran Bappeda dalam perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Cihonje Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran..	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut proses perumusan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan infrastruktur jalan dapat dilihat dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang terdiri dari Musrembang desa, Musrembang kecamatan, dan Musrenbang RKPD Kabupaten. Tahapan kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Pangandaran terdiri dari proses perencanaan, penyelenggaraan

			kebijakan publik dan pengawasan.
9	Tri Agustin Ritonga (2023)	Efektivitas Peran BAPPEDA Dalam Perencanaan Pembangunan Labuhan Batu	Efektivitas dapat dipahami sebagai penilaian keberhasilan suatu hasil. Organisasi yang efisien akan berdampak positif pada produksinya. Untuk memimpin suatu organisasi diperlukan seorang pemimpin organisasi serta departemen dan bidang yang saling berkoordinasi agar berhasil menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya. Pekerjaan di lingkungan organisasi Bapeda juga akan lebih efisien jika didukung dengan sumber daya peralatan yang adaptif atau dapat menggunakan sistem/teknologi informasi.
10	Desi Yusnira, Dewi Sartika (2023)	Efektivitas Peran Bappeda Dalam Perencanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Aceh Barat Daya	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara umum peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam Perencanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah termasuk ke dalam kriteria sangat efektif, hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata tingkat efektivitas penerimaan PAD Kab. Abdya sejak tahun 2019 hingga 2022 yaitu sebesar 107,51%.

1. Dalam penelitian ini sama-sama menggunakan objek BAPPELITBANGDA sebagai penelitian dengan menggunakan metode penelitian yang sama yaitu kualitatif. Adapun perbedaan penelitian ini

dengan penulis yaitu subjek dari penelitian yang memang penulis menggunakan subjek peran BAPPELITBANGDA dengan permasalahan yang berbeda dan alamatnya yang berbeda.

2. Adapun persamaan penelitian ini. Peneliti sama-sama menggunakan objek BAPPELITBANGDA sebagai penelitian dengan menggunakan metode penelitian yang sama yaitu kualitatif. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu subjek dari penelitian yang memang penulis menggunakan subjek peran BAPPELITBANGDA dengan permasalahan yang berbeda dan alamatnya yang berbeda.
3. Peneliti sama-sama menggunakan objek BAPPELITBANGDA sebagai penelitian dengan menggunakan metode penelitian yang sama yaitu kualitatif. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu subjek dari penelitian yang memang penulis menggunakan subjek peran BAPPELITBANGDA dengan permasalahan yang berbeda dan alamatnya yang berbeda.
4. Dalam penelitian ini sama-sama menggunakan objek BAPPELITBANGDA sebagai penelitian dengan menggunakan metode penelitian yang sama yaitu kualitatif. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu subjek dari penelitian yang memang penulis menggunakan subjek peran BAPPELITBANGDA dengan permasalahan yang berbeda dan alamatnya yang berbeda.
5. Peneliti sama-sama menggunakan objek BAPPELITBANGDA sebagai penelitian dengan menggunakan metode penelitian yang sama yaitu kualitatif. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu subjek dari penelitian yang memang penulis menggunakan subjek peran BAPPELITBANGDA dengan permasalahan yang berbeda dan alamatnya yang berbeda.
6. Adapun persamaan penelitian ini. Peneliti sama-sama menggunakan objek BAPPELITBANGDA sebagai penelitian dengan menggunakan metode penelitian yang sama yaitu kualitatif. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu subjek dari penelitian yang memang penulis

menggunakan subjek peran BAPPELITBANGDA dengan permasalahan yang berbeda dan alamatnya yang berbeda.

7. Dalam penelitian ini sama-sama menggunakan objek BAPPELITBANGDA sebagai penelitian dengan menggunakan metode penelitian yang sama yaitu kualitatif. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu subjek dari penelitian yang memang penulis menggunakan subjek peran BAPPELITBANGDA dengan permasalahan yang berbeda dan alamatnya yang berbeda.
8. Adapun persamaan penelitian ini. Peneliti sama-sama menggunakan objek BAPPELITBANGDA sebagai penelitian dengan menggunakan metode penelitian yang sama yaitu kualitatif. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu subjek dari penelitian yang memang penulis menggunakan subjek peran BAPPELITBANGDA dengan permasalahan yang berbeda dan alamatnya yang berbeda.
9. Peneliti sama-sama menggunakan objek BAPPELITBANGDA sebagai penelitian dengan menggunakan metode penelitian yang sama yaitu kualitatif. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu subjek dari penelitian yang memang penulis menggunakan subjek peran BAPPELITBANGDA dengan permasalahan yang berbeda dan alamatnya yang berbeda.
10. Adapun persamaan penelitian ini. Peneliti sama-sama menggunakan objek BAPPELITBANGDA sebagai penelitian dengan menggunakan metode penelitian yang sama yaitu kualitatif. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu subjek dari penelitian yang memang penulis menggunakan subjek peran BAPPELITBANGDA dengan permasalahan yang berbeda dan alamatnya yang berbeda.

1.4.2 Signifikasi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu khususnya tentang peran bidang analisis pembangunan perencanaan program pengendalian evaluasi dan pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bekasi dalam

perencanaan pembangunan (BAPPELITBANGDA) Dalam Perencanaan Pembangunan. di dalam lembaga pendidikan dan penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat:

- a. Bagi Penulis Penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dalam menambah wawasan tentang Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bekasi (BAPPELITBANGDA) dalam penyelenggaraan pemerintahan guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana (S1)
- b. Bagi Masyarakat Penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat umum atau pembaca terutama para pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bekasi (BAPPELITBANGDA) mengenai fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bekasi (BAPPELITBANGDA) berdasarkan peraturan yang ada, agar dalam melaksanakan tugasnya tidak melampaui batas yang ditentukan terlebih untuk Peran Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bekasi (BAPPELITBANGDA).

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab dan setiap bab terdiri dari sub – sub pembahasan dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian dan sistematikan penelitian.

BAB II KERANGKA TEORI

Bab ini berisikan perspektif teori, definisi para ahli, kerangka pemikiran dan asumsi penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan paradigma penelitian, metode penelitian, desain penelitian, sumber dan teknik perolehan data, uji keabsahan data, tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitian dan keterbatasan penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini berisikan gambaran umum objek penelitan, hasil penelitian dan pembahasan

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan rekomendasi atau menyimpulkan suatu bagian akhir pada penelitian yang memuat isi keseluruhan penelitian dengan lebih singkat, padat dan jelas tentang penelitian tersebut.